

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pertumbuhan dan perkembangan pendapatan nasional yang semakin meningkat di Indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam merealisasikan sistem perekonomian yang telah dibuat dan mampu mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kasmir, 2012).

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha baik di sektor tradisional maupun modern (Partomo, 2004).

Salah satu pihak yang berperan dalam intermediasi penyaluran dana adalah perbankan (Nurhidayat:2010). Dalam berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi Perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan

taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya (Pato, 2013).

Dalam perbankan ada berbagai macam produk yang diberikan oleh bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Fungsi pemberian kredit ini sangat membantu masyarakat. Sebagaimana fungsinya bank merupakan lembaga masyarakat yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dan memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk pinjaman atau kredit (Sujarwo, 2010)

Di kota Ambon terdapat 2 bank yang menerapkan prinsip syariah islam yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri di kota Ambon ini baru saja diresmikan pada pertengahan tahun 2015 yang lalu. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon lebih mengutamakan pengusaha kecil dalam memberikan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR), dimana salah satu visi Bank Syariah Mandiri adalah penyaluran pembiayaan pada segmen UKM dan KUR. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon ini sendiri ditekankan bukan hanya untuk membantu masyarakat dalam KUR namun untuk penyaluran pembiayaan juga agar mengutamakan pengusaha kecil dari pada pengusaha besar.

Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kerja. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan (Ahmad, 2013). Dengan pengendalian internal yang baik mampu menciptakan pelaporan keuangan yang baik pula (Bon kim, dkk : 2008),

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon Maluku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemberian kredit usaha kecil dan menengah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon Maluku.

D. Manfaat Penelitian

Memberikan pembuktian tentang pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha kecil dan menengah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon Maluku